

DEMOKRASI DAN DISRUPSI IDENTITAS

Pengalaman Pemilu 2019 di Indonesia

Editor:
Endi Haryono
Guswandi
Abdullah Sumrahadi



DAFTAR ISI

Pengantar Rektor Universitas Krisnadwipayana	iii
Pengantar Rektor President University.....	v
Pengantar Editor.....	vii
Daftar Isi.....	xv
Fenomena Kebangkitan Populisme Islam di Indonesia: Kasus Pemilihan Umum 2019 <i>Abubakar Elby Hara</i>	1
Mempertanyakan Politik Inklusif dan Moderasi Partai Politik Islam Pasca Pemilu 2019: Demokratisasi Berlanjut atau Cukup Sampai di Sini? <i>Witri Elevanti</i>	21
Islam di Sumatera Barat dalam Politik Pilpres 2019 <i>Riki Dhambaran Putra</i>	31
Moderasi dan Inklusi (Eks) Jihadis Melalui Pemilu 2019: Narasi dari Poso <i>Moh. Zaki Arrobi</i>	43
Fenomena Politik Keumatan dan Kebangsaan Pilpres 2019 <i>Saefudin Zubri</i>	55

Demokrasi dan Disrupsi Identitas
Pengalaman Pemilu 2019 di Indonesia
© President University Press, 2019
Hak cipta ada pada masing-masing penulis

Editor
Esdi Haryono
Guswandi
Abdullah Sumrahudi

Penata sampul & Isi
Ade Achmad Humail

Demokrasi dan Disrupsi Identitas
Jakarta: President University Press, 2019
1 - xvi + 190 hlm., 15 x 23 cm
ISBN: 978-602-010653-3

Cetakan Pertama, Oktober 2019

PRESIDENT UNIVERSITY PRESS
Jubels Education Park
Jl. KJ Hajar Dewantara, RT 2/RW 4,
Mekarmiti, Kec. Cikarang Utara,
Bekasi, Jawa Barat 17250

Agama dan Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Sebuah Pembelajaran Untuk Masa Depan Demokrasi Indonesia <i>Mohammad Syafii Arwar</i>	65
Pelaporan Media Massa dan Islamophobia: Studi Kasus Pemilu Indonesia 2019 <i>Mohammad Kaudy Gathmyr</i>	97
Evaluasi Pemilu Serentak 2019 <i>Sri Nuryanti</i>	199
Mengurai Kerumitan dan Kerumunan Pemilu Indonesia <i>Marwanfa</i>	131
Catatan Politik Pemilu 2019: Arah Politik Kaum Muda Pasca Pemilu 2019 <i>David Krisna Alka</i>	141
Rekonsiliasi Kekuasaan dan Kepatuhan Warga <i>Lukas Liewario</i>	149
Kontroversi Isu Rekonsiliasi di Kalangan Pendukung Prabowo Pasca Pilpres 2019 <i>Satrio Arismunandar</i>	157
Konsolidasi Pasca Kontestasi: Peta Aktor dalam Rekonsiliasi Pemilu 2019 <i>Rafif P. Imasvan, Jefri Adriansyah & Gunawan Hartono</i>	167
Biodata Editor dan Penulis.....	183

KEBANGKITAN POPULISME ISLAM DI INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM 2019

Abubakar Eby Hara^{1*}

Abstrak—Paper ini mencoba mendiskusikan fenomena kebangkitan populisme Islam di Indonesia. Pada pemilihan Presiden tahun 2019, jargon-jargon populis yang berangkat dari ajaran Islam digunakan dalam kampanye untuk memenangkan Pemilihan Presiden. Jargon-jargon populis Islam ini diinterpretasikan sebagai usaha untuk menyuarakan suara murni dari rakyat untuk melawan rejim tirani yang seringkali digambarkan sebagai sekuler, korup dan anti-Islam. Jargon demikian terutama digunakan oleh pendukung calon oposisi Prabowo Subianto untuk mengalahkan President Joko Widodo yang sedang

^{1*} Penulis berterimakasih kepada Agus Trihartono Ph.D dari G-RISMI Universitas Jember yang banyak memberi masukan dan komentar dalam persiapan paper ini dan kepada Dr. Endi Haryono dari President University yang memberikan masukan, kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi dalam lokakarya penulisan buku ini.

berkuasa. Namun terlepas dari kebangkitannya yang cukup marak, hasil Pemilu Presiden menunjukkan bahwa pengaruh populisme Islam ini sangat terbatas. Mengapa hal ini terjadi merupakan pertanyaan utama dalam paper ini. Kami berpendapat bahwa kegagalan populisme Islam dipengaruhi oleh tiga kondisi penting. Pertama, terdapat kondisi yang menunjukkan bahwa penerimaan terhadap sistem demokrasi dengan nilai-nilai seperti kesederajatan, fairness dan anti-diskriminasi masih cukup kuat sehingga menjalarkan isu-isu identitas dan sektarianisme. Kedua, populisme Islam merupakan fenomena yang relatif baru di Indonesia dan diragukan apakah ia merupakan bagian dari mainstream politik Islam di Indonesia. Ketiga dalam konteks historis, politik Islam di Indonesia selalu diperdebatkan dan populisme Islam yang muncul belakangan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak solid dan berbeda secara ideologis. Untuk membahas masalah ini, penelitian dilakukan dengan menelusuri berbagai tema kampanye dari para calon Presiden dan pendukungnya di berbagai media dan penggunaan data statistik dari Lembaga survey nasional.

Keywords— *populisme Islam, pemilihan Presiden, Indonesia, Joko Widodo dan Prabowo Subianto*

Pendahuluan

Dalam pemilu di Indonesia tanggal 17 April 2019, penggunaan isu agama cukup signifikan dalam berbagai kampanye, perdebatan wacana di media online dan diskusi di berbagai forum. Penggunaan isu-isu agama ini telah berhasil memobilkan dan menggerakkan massa Muslim yang cukup besar untuk turun ke jalan seperti dalam Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 dan serangkaian Aksi lain yang meniru keberhasilan gerakan itu. Melihat perkembangan

demikian, pada satu sisi terdapat kekhawatiran bahwa penggunaan isu agama dianggap terlalu sensitif dan tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi Indonesia yang baru tumbuh. Fenomena ini juga dipandang tidak kondusif untuk persatuan dan pengembangan ideologi Pancasila. Namun pada sisi lain, fenomena ini dipandang wajar dalam sistem demokrasi dan menjadi hak setiap warga untuk menyuarakan ekspresinya secara bebas. Di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan Eropa isu yang berkaitan dengan identitas, juga merupakan fenomena yang sedang marak.

Paper ini tidak berupaya secara spesifik membahas jalan keluar dari kedua pandangan di atas karena kedua pandangan itu memiliki landasan masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan. Paper ini lebih menonjolkan kemunculan fenomena populisme Islam tersebut, bagaimana kata menjelaskannya secara tepat, sejauh mana pengaruhnya dan kenapa arah politik Indonesia dengan adanya fenomena itu. Berbagai pendekatan bisa digunakan untuk membahas kemunculannya. Dalam paper ini kami akan menggunakan konsep populisme khususnya populisme Islam untuk menjelaskan kebangkitan dan pengaruh populisme Islam di Indonesia. Dalam pandangan kami, pengaruh populisme Islam memang terbatas, namun karena appealnya yang cukup kuat, sebagai strategi politik, ia akan tetap digunakan untuk menggalang massa untuk memprotes pemerintah.

Paper ini dibagi dalam 4 bagian. Bagian pertama akan membahas isu-isu konseptual berkaitan dengan populisme Islam. Bagian kedua melihat bagaimana kemunculan dan perkembangan politik Islam dan populisme Islam. Bagian ketiga menjelaskan sebab kegagalan populisme Islam dalam Pemilu 2019. Bagian keempat membahas arah politik Indonesia dengan kemunculan populisme Islam.

Populisme dan Populisme Islam

Sebelum membahas paper ini lebih lanjut, beberapa hal berkaitan dengan konsep populisme perlu dibahas. Populisme secara umum didefinisikan sebagai representasi dari suara murni dan murni rakyat untuk melawan dominasi dari segelintir elit yang korup di puncak kekuasaan (Mudde, 2017; Urbiniati, 2013). Namun para ahli berbeda dalam melihat fungsi dan konsekuensi populisme. Pada satu sisi, mereka mendukung populisme sebagai pernyataan aspirasi murni dari rakyat untuk menghadapi semakin menguatnya oligarki kekuasaan di tangan elit. Karenanya, bagi para pakar ini, gerakan-gerakan populis diperlukan untuk menekan elit agar lebih peka terhadap kebutuhan rakyat. Dalam bentuknya yang paling ekstrem, populisme menemukan bentuknya dalam istilah demokrasi murni dan merupakan bentuk ekspresi masyarakat yang merasa tidak terwakili dalam sistem politik padahal mereka seharusnya berdaulat (Urbiniati, 2013).

Namun pada sisi lain, populisme dilihat mengancam demokrasi. Ini terutama demikian, jika populisme diperkuat dengan politik identitas seperti ditulis oleh Meléndez and Kaltwasser (Meléndez & Rovira Kaltwasser, 2017) Menurut mereka, gerakan populis muncul jika masyarakat mempunyai identitas politik anti-establishment yang kuat. Di Indonesia, kemunculan populisme yang diramu dengan politik identitas telah memunculkan kekhawatiran akan stabilitas politik dan kelanjutan demokrasi itu sendiri. Hal ini karena munculnya berbagai mobilisasi massa yang besar seperti yang terjadi di Jakarta (Muhtadi, 2019). Dalam kasus-kasus lain, populisme dan nasionalisme juga dapat mengambil bentuk ekstrem sehingga sering digunakan untuk mendekreditkan mereka yang disebut asing dan minoritas. Dari sudut pandang ini,

karenanya, populisme dilihat mengancam demokrasi (Hara, 2017).

Populisme di Indonesia mempunyai kedua fenomena di atas walaupun tidak sepenuhnya bisa dipolakan dalam kedua pandangan itu karena ada variasi tertentu yang cukup unik. Menurut Mietzner, populisme Jokowi, sebagai contoh, menggunakan term-term teknokratis yang tidak umum digunakan di Barat, atau yang dia sebut sebagai 'technocratic populism' (Mietzner, 2015). Populisme Jokowi, khususnya pada kampanye pemilihan Presiden 2014, mendefinisikan kepentingan rakyat lebih dalam term-term pentingnya memperbaiki pelayanan dan birokrasi, meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat dalam berbagai bidang seperti kesehatan dan Pendidikan. Ia melakukan ini misalnya dengan memberikan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar kepada mereka yang layak mendapatkannya.

Pada sisi lain, populisme Prabowo dan para pendukungnya juga tidak sepenuhnya mengikuti model di Barat. Prabowo dan para simpatisannya memang menggunakan jargon-jargon anti asing, seperti yang umumnya digunakan di Eropa dan Amerika. Tetapi mereka tidak berhenti di sini, karena ada isu identitas agama dan ajaran moral Islam yang ditekankan dalam kampanye mereka untuk mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat Islam. Gabungan dari berbagai jargon ini memang melahirkan identitas dan loyalitas yang militan dan kuat dari para pendukung Prabowo dan berhasil menarik garis-identitas jelas antara siapa kita dan siapa mereka (Hara, 2017).

Dari uraian di atas, dapat dikatakan terdapat varian populisme di Indonesia yang tidak berkembang di Barat, walaupun tentu saja esensi populisme yaitu klaim mewakili suara rakyat tetap ada. Selain *technocratic populism* dari Jokowi, populisme Islam

juga jarang dibahas dalam literatur dan media masa Barat. Populisme Islam sama seperti populisme umumnya, hanya saja kata rakyat diganti dengan kata ummah (Hadiz, 2016). Jadi populisme Islam bisa diinterpretasikan sebagai representasi dari suara muru ummah melawan elit yang korup dan tidak bermoral. Seperti dikatakan Vedi Hadiz, populisme Islam berhubungan dengan keadaan penindasan dan marginalisasi orang-orang Muslim baik pada tingkat global maupun lokal sejak masa kolonial dan usaha kelompok-kelompok Islam ini untuk melawan ketidakadilan itu (Hadiz, 2016). Dalam banyak hal paper ini akan merujuk pada pemahaman populisme Islam demikian, namun fokus lebih diberikan pada penggunaan berbagai retorik tentang ummat yang dimarginalisir dan ditekan dengan tujuan utama untuk memobilisir kekuatan masa dalam pemilihan Presiden April 2019.

Dalam pengertian ini, populisme Islam merupakan strategi atau gaya politik. Strategi ini dilakukan dengan menggunakan nu- nu ini termasuk yang dipandang diluar mainstream konsepkan politik umumnya atau yang biasa disebut *political correctness* dalam sistem politik (Cummings, 2001). Mereka sering menggambarkan pemerintah bukan hanya tidak adil dan merugikan umat Islam tetapi juga menghambat perkembangan Islam dan bahkan mendukung pertumbuhan komunisme yang merupakan musuh bersama umat Islam. Dengan menggunakan nu- nu ini agama ini, mereka berupaya menempatkan pemerintah sebagai musuh Islam dan memobilisasi kekuatan rakyat untuk melawannya.

Politik populis semacam itu tidak unik di Indonesia. Kampanye di luar *political correctness* telah berkembang di Eropa dan terutama Amerika Serikat (AS). Di AS, tema kampanye yang menyimpang dari tema politik umum yang dianggap masuk akal, benar dan perlu didukung untuk memastikan

keadilan dan kesetaraan, telah berhasil menarik dukungan besar. Donald Trump, misalnya, mengatak basa-basi politik demi keberadaban dan kesederajatan, sebaliknya ia mengatakan dengan jujur apa masalah yang dihadapi oleh orang Amerika seperti jumlah imigran ilegal yang menyebabkan pengangguran dan disingirkannya nilai-nilai tradisional masyarakat Barat. Dalam kasus AS, penggunaan komunikasi yang dipandang positif dan mendukung ketertarikan telah menjadi bumerang di tengah kampanye negatif Trump (Conway, Repke, Houck, & Houck, 2017).

Keberhasilan menciptakan identitas anti-asing, nasionalis dan dalam tingkat tertentu juga berpihak pada kepentingan umat yang tertindas, memunculkan para pendukung Prabowo untuk menjauhkan diri dari pemerintah yang dianggap tidak membela kepentingan Islam, tidak bermoral, curang dan pro-asing terutama Cina. Pendukung Prabowo juga berhasil memobilisasi kekuatan yang cukup besar selama kampanye pemilihan Presiden dan setelah pemilihan berakhir. Klaim superioritas moral atas petubana dan anggapan bahwa mereka memperjuangkan nilai-nilai demokrasi murni dan kepentingan masyarakat luas telah berhasil memobilisasi sebagian masyarakat untuk menolak hasil pemilu yang dianggap penuh dengan manipulasi dan penipuan sistematis. Dengan cara ini, mereka menganggap sah untuk melawan pemerintah melalui berbagai protes dan demonstrasi.

Namun, walaupun ada kampanye massif di atas, dalam pemilihan presiden bulan April 2019 yang menampilkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai incumbent melawan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, penggunaan berbagai jargon populis dan kampanye yang dianggap bertentangan dengan *political correctness* gagal menarik dukungan signifikan untuk memenangkan pemilihan Presiden. Mengapa ini

terjadi adalah masalah yang akan diuraikan lebih lanjut dari masalah ini. Jawabannya akan merujuk pada konteks politik Indonesia dan kondisi politik umat Islam itu sendiri dalam perjalanan politik Indonesia. Untuk menjawab hal ini, kami menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh dari survei yang kemudain diproses dan ditampikan kembali untuk dianalisis. Sumber data utama diambil dari Exit Polls yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada Pemilu April 2019. Sample Exit Polls adalah 3000 diambil melalui dua tahap pengambilan sampelacak sistematis. Exit-margin of error (MoE) diperkirakan ± 2% pada tingkat kepercayaan 95%, menggunakan simple random sampling. Selain itu, beberapa data juga diperoleh dari laporan di media.

Kemunculan dan praktek populisme Islam

Pembicaraan tentang hubungan Islam dan politik di Indonesia sudah bermula bahkan sebelum kemerdekaan. Perdebatan pada saat itu dibandingkan sekarang sebenarnya lebih bersifat substantif, ideologis dan mendalam. Para pendukung negara Islam, tidak menggunakan label Islam secara umum untuk memobilisasi massa melawan lawan politik yang dianggap tidak bermoral dan korup. Perdebatan tentang ideologi itu berjalan secara demokratis dan bersahabat satu dengan yang lain. Mereka berbeda pandangan tapi bersahabat dan tidak membenci satu sama lain. Mereka berbeda secara adologis tetapi sahabat sebagai orang yang ingin memajukan bangsa. Labeling terhadap lawan politik tidak semasih dan negative seperti yang terjadi sekarang ini, dimana konstruksi kawan dan lawan sangat kuat dan menimbulkan polarisasi yang tajam di masyarakat.

Perrancangan ideologis tentang asas negara di masa itu kemudian berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke Pancasila dan UUD 1945. Walaupun mungkin terdapat mobilisasi masa Islam juga pada masa itu, tetapi Partai-partai Islam yang memperjuangkan ideologi Islam jarang disebut sebagai gerakan populisme Islam. Hal itu mungkin berkaitan dengan isu-isu yang dimainkan dan statemen ideologi yang cukup jelas. Ideologi Islam diinterpretasikan secara lebih jelas dan transparan dengan program yang jelas serta tidak hanya sekedar menggunakan asumsi bahwa Islam baik dan yang tidak setuju dianggap anti Islam dan buruk atau tidak bermoral.

Pada masa Orde Baru, mobilisasi politik dengan menggunakan isu agama dilarang, sehingga kelompok-kelompok yang memperjuangkan negara Islam kebanyakan terlap atau sebagian pergi ke luar negeri bergabung dengan gerakan-gerakan Islam di sana. Di dalam negeri, untuk survive, kebanyakan kelompok Islam melakukan penyusunan dengan sistem politik Orde Baru dengan misalnya menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Gerakan Islam kemudian banyak beralih dari gerakan politik ke gerakan sosial kemasyarakatan ataupun gerakan intelektual.

Namun jatuhnya rejim Soeharto, membuka jalan bagi pemulihan sistem demokrasi yang memungkinkan kebebasan dan partisipasi politik yang luas. Partai-partai Islam kemudian muncul kembali ke permukaan dengan harapan dapat mengusung kembali cita-cita pembentukan negara Islam. Namun appeal negara Islam itu tidak lagi menarik perhatian sehingga partai-partai yang mengusung cita-cita negara Islam tidak mendapat dukungan yang signifikan di DPR. Sebagian mereka harus gugur dan tidak bisa ikut pemilu lagi karena tidak memenuhi aturan ambang batas persentase suara yang

diponoh dalam pemilu yang ditentukan oleh Undang-undang. Sebagian lain melakukan penyestiaan dalam ideologi dan programnya untuk bertahan.

Kepagalan partai-partai Islam itu menyebabkan mereka yang ber-cita-cita menegakkan Islam di Indonesia bergabung atau membentuk gerakan-gerakan Islam seperti HTI, Forum Aman Islam, Laskar Jihad dan FPI. Dalam perkembangan dan pengelanaan gerakan-gerakan ini, mereka belajar bahwa mobilisasi masa merupakan metode yang tepat bukan saja untuk menunjukkan eksistensi mereka tetapi juga untuk merealisasikan tujuan politik mereka. Demikian lah misalnya, dapat dilihat mobilisasi kekuatan yang dilakukan dalam kasus pembunuhan Basuki Tjahaja Purnama dari tampuk kekuasaan pada tahun 2016-2017. Label Islam dan bukan Islam tiba-tiba diadiri sebagai satu kekuatan besar untuk menggalang massa untuk tujuan politik setidaknya jangka dekat dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.

Dalam kampanye pemilu 2019, metode yang sama dicoba untuk dimainkan lagi untuk mendukung calon Presiden Prabowo. Para pendukung Prabowo misalnya memobilisir massa pendukung mereka dengan berupaya menciptakan imej bahwa calon incumbent Joko Widodo anti Islam bahkan menghambat umat Islam untuk beribadah. Berbagai narasi seperti Jokowi akan melarang azan, mengkriminalisasi ulama, Jokowi berekonomi dengan penista agama dan penggambaran bahwa Islam terancam bila Jokowi terus berkuasa, merupakan diantara narasi yang diciptakan untuk memperkuat imej Islam as non-Islam dalam politik Indonesia.

Dalam kadar tertentu, strategi politik demikian serupa dengan strategi politik populisme di Eropa dan Amerika. Gerakan Islam dewasa ini memiru gerakan-gerakan populis di Amerika yang mendefinisikan diri berdasarkan keunggulan

Keterbatasan Populisme Islam: Beberapa penyebab

Ada beberapa jawaban untuk masalah mengapa populisme Islam tidak berhasil meningkatkan suara oposisi secara signifikan pada Pemilu 2019. Pertama, setidaknya ada tiga alasan utama yang harus dibahas. Pertama, *political correctness* yang merupakan gambaran ideal dari demokrasi masih cukup kuat. Artinya masyarakat umumnya mendukung sistem demokrasi dan proses pemilu. Kedua, populisme Islam yang digunakan oleh kelompok Prabowo bukanlah bagian dari Islam arus utama di Indonesia. Ketiga, populisme Islam Prabowo bukanlah populisme yang solid. Kami akan menjelaskan tiga faktor ini secara terperinci di bawah ini.

Pertama, meskipun ada kampanye populisme yang cukup masif yang dibombardir dengan sentimen keagamaan, survei menunjukkan bahwa tingkat penerimaan demokrasi masih kecil. Tabel berikut menunjukkan penerimaan sistem demokrasi oleh masyarakat

Tabel 2. Implementasi Demokrasi (Indikator, 2019)



Meskipun peringkat demokrasi Indonesia menurun 20) tingkat menjadi peringkat 65, yang artinya hanya satu tingkat saja di atas Singapura yang biasanya dipandang menganut sistem semi-demokrasi (The Economist, 2018), dari Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat pada

ras, etnis dan agama dan menganggap mereka yang berbeda dari kelompok mereka sebagai buruk, tidak demokratis, tidak Islamis dan mendukung korupsi. Dalam kadar tertentu populisme Islam cukup efektif dalam menggalang massa. Dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama gerakan populis ini juga berhasil memenangkan calon Islam yang mereka dukung untuk mengalahkan calon bukan Islam yang dianggap mengkhianati Islam.

Bagi banyak orang fenomena demikian mengkhawatirkan karena akan menimbulkan polarisasi di masyarakat, ia dianggap tidak kondusif bagi demokrasi bahkan berlawanan dengan asumsi *political correctness* dalam kehidupan demokrasi. Tetapi, penggunaan retorika popofis tampaknya tidak berhasil mengirimkan suara oposisi di bawah Prabowo secara signifikan dalam pemilihan presiden. Bahkan dalam pemilihan presiden 2019, margin antara Jokowi dan Prabowo yang juga ikut dalam pemilihan 2014, melebar seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Table 1. Hasil Pemilihan Presiden

	2014		2019	
	Jokowi-JR	Prabowo-Hatta	Jokowi-Ma'ruf	Prabowo-Sandi
Votes	70,997,833	62,576,444	85,607,362	68,650,239
Percentage	53,15%	46,85%	55,50%	46,50%
Total votes	133,574,277		154,257,601	
Margin	8,421,389		16,957,123	

Dalam pemilihan 2014, perbedaan antara dua pasangan suara hanya 8.421.389 sementara pada pemilihan 2019 perbedaan suara presiden dua kandidat hampir dua kali lipat menjadi 16.957.123 untuk kemenangan Jokowi (Andriyanto, 2019).

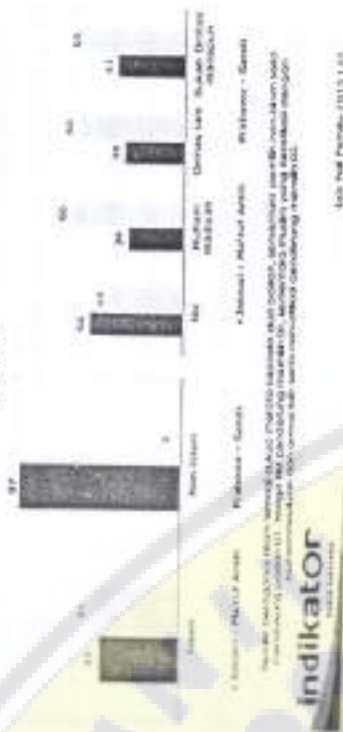
Penggunaan internet seperti WhatsApp dan Facebook serta berbagai analisis di web pribadi dan blog sangat mempengaruhi pandangan komunitas. Para elit yang mendukung Prabowo menggunakan masalah moral sederhana secara transparan, luhur dan suci, yang mudah dicerna publik. Deskripsi bahwa elite pemerintah penuh dengan penipuan dan ketidakjujuran sebagai penyebab penurunan moral bangsa dengan mudah memasuki benak umat yang umumnya memahami agama dalam kerangka absolut benar atau salah.

Fenomena ini nampaknya bersifat sementara karena tergantung pada kepentingan elit yang ingin berkuasa dan memenangkan pemilihan umum. Fenomena ini juga terbatas pada kelompok kelas menengah perkotaan di kota-kota besar di Sumatra dan Jawa Barat. Tetapi sampai batas tertentu ia memiliki daya tarik yang kuat dibandingkan dengan pengaruh organisasi besar seperti Muhammadiyah dan NU yang sudah sangat mapan. Dua organisasi terakhir ini sering dianggap mandiri dan membiarkan kondisi negara yang buruk sebagai sesuatu yang normal atau setidaknya dapat ditoleransi. Masalahnya tentu saja bahwa masalah moral lebih banyak digunakan dan dimanipulasi oleh para elit yang memiliki ambisi kekuasaan, daripada sebagai upaya yang benar-benar serius untuk mengatasi kebobrokan moral bangsa. Upaya mengatasi keadaan korupsi tentu tidak sederhana retorika yang dilakukan. Dengan kata lain, pemimpin kelompok-kelompok oposisi benar-benar menggunakan isu populis dan moralis dengan justifikasi agama untuk mencapai tujuan politik mereka.

Meskipun ada kecenderungan seperti itu, dalam kerangka nasional yang lebih luas, pengaruh kelompok moral-populis ini belum berhasil meningkatkan suara Prabowo secara signifikan seperti yang ditunjukkan pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Voting menurut Agama dan Organisasi Keagamaan (Indikator, 2019)

Pilihan Presiden Menurut Agama & ID Ormas Islam



Mayoritas responden mengaku sering mempertimbangkan situasi agama atau nilai-nilai Islam dalam membuat pilihan politik. Namun, berdasarkan agama, umat Islam terbagi secara relatif merata ke berbagai partai, sementara non-Muslim lebih solid terutama dalam mendukung partai nasionalis yang berkuasa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pemilih yang memilih partai berdasarkan agama hanya sekitar 4%. Ini berarti bahwa memiliki sikap keagamaan dan berpikir tentang agama tidak secara langsung berkaitan dengan keputusan untuk memilih partai berdasarkan agama. Pemilih Muslim dibagi secara merata untuk dua pasangan calon, sementara pemilih non-Islam solid mendukung pasangan calon Jokowi-Ma'ruf. Pengikut Nahdlatul Ulama (NU) cenderung memilih acumbent, sedangkan Muslim yang berafiliasi dengan Muhammadiyah dan organisasi massa lainnya dan non-afiliasi cenderung memilih Prabowo-Sandi.

Presiden Jokowi, dalam tingkat tertentu, juga memainkan populisme Islam dengan menunjuk Ma'ruf Amin sebagai

kandidat wakil presiden yang mewakili kalangan Islam arus utama NU. Dia juga merangkul tokoh ulama seperti Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zamul Majidi dari Nusa Tenggara Barat. Dengan cara ini, pada tingkat tertentu Jokowi mencoba memecah konsentrasi dukungan dari kelompok Islam populis di belakang Prabowo. Kelompok-kelompok ini menunjukkan bahwa mereka melihat Pancasila sebagai kesepakatan bersama bagian dari perjuangan bangsa dan menjadi tujuan dalam kehidupan negara.

Alasan ketiga mengapa populisme Islam tidak cukup kuat untuk memenangkan calon oposisi adalah bahwa gerakan ini bukan merupakan koalisi gerakan yang solid. Selain terdiri dari beberapa unsur kepartaian yang berbeda yaitu Islam dan nasionalis yang didalamnya terdapat orang dari berbagai agama, populisme Islam digunakan untuk tujuan yang sempit dan terbatas dari segelintir elit partai untuk mendapatkan bargaining position dalam politik setelah Pemilu. Populisme Islam mungkin bisa dikatakan tumbuh dan membesar karena kekecewaan dengan kondisi umat yang tertindas. Mereka mendukung tokoh oposisi yaitu Prabowo yang dianggap paling mungkin mengalahkan Jokowi. Namun, track-record Prabowo sebagai pendukung perjuangan umat tidak benar-benar dianggap penting. Dalam istilah Hadiz, populisme Islam sebenarnya telah dibajak untuk memperkuat oligarki kekuasaan (Pane, 2018), sesuatu yang bertentangan dengan tujuan asli populisme itu sendiri. Hal ini dijustifikasi dalam perkembangan terakhir dimana kubu Prabowo dilihat mulai mendekati kubu Presiden Jokowi untuk melakukan deal-deal politik. Dengan kata lain populisme pada akhirnya merupakan strategi politik untuk memperoleh kekuasaan yang secara tidak langsung juga memperkuat oligarki politik yang memang sudah kuat baik di kalangan penguasa maupun oposisi.

Dalam tingkat koalisi kepartaian, Koalisi Prabowo terdiri dari kombinasi partai-partai berbasis Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanah Nasional (PAN) dengan partai-partai berbasis nasionalis seperti partai pimpinan Prabowo, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Demokrat dan beberapa partai lain seperti Partai Berkarya, Kombinasi partai dengan beragam ideologi ini memang dikawatirkan menghadirkan koalisi yang tidak utuh. Partai-partai Islam menggunakan wacana Islam yang kemahalan didukung oleh beberapa pemimpin agama dan sekelompok Islam dalam kampanye untuk mendiskreditkan pemerintahan sebagai anti-Islam. Tetapi partai-partai seperti Partai Demokrat tampaknya enggan menggunakan retorika Islam dalam kampanye mereka, bahkan pada tingkat tertentu mereka mengambil jarak dari Gerindra dan partai-partai koalisinya pada berbagai peluang kampanye dan setelah pemilihan presiden. Mereka menganggap kampanye demikian tidak inklusif dan dapat memecah belah persatuan dan kebinekaan bangsa (CNN Indonesia, 2019).

Kesimpulan

Populisme Islam memang bisa dikatakan sedang berkembang. Namun pengaruhnya masih bisa dikatakan terbatas. Terlebih jika dilihat dari hasil Pemilihan Umum terakhir, pengaruh populisme Islam tidak cukup kuat untuk memenangkan calon oposisi Prabowo. Namun demikian, populisme Islam tidak dapat diabaikan. Suka atau tidak suka, itu akan menjadi fenomena di masyarakat Indonesia yang tidak dapat dihilangkan. Ini adalah refleksi dari perasaan tertindas dan terpinggirkan dari beberapa kalangan Muslim, yang merupakan lahan subur bagi elit penguasa untuk mengangkatnya sebagai isu yang *entry* dalam

pemilihan umum. Fenomena ini hanya akan berkurang jika pemerintah dan elit benar-benar mencoba untuk mengatasi akar penyebab perasaan tertindas dan terpinggirkan dalam komunitas Muslim.

Referensi

- Andriyanto, H. (2019). Dibandingkan 2014, Selisih Suara Jokowi Atas Prabowo Naik 101%. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/politik/555347/dibandingkan-2014-selisih-suara-jokowi-atas-prabowo-naik-101>
- CNN Indonesia. (2019). Surat SBY dan Jubah Politik Islam Prabowo. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190408113714-32-384221/surat-sby-dan-jubah-politik-islam-prabowo>
- Conway, L. G., Repke, M. A., Houck, S. C., & Houck, S. C. (2017). Donald Trump as a cultural revolt against perceived communication restriction: Priming political correctness norms causes more Trump support. *Journal of Social and Political Psychology*, 5(1), 244–259. <https://doi.org/10.5964/jpp.v5i1.732>
- Cummings, M. S. (2001). *Beyond political correctness: social transformation in the United States*. L. Rienner Publishers.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316402382>
- Hara, A. E. (2017). Populism in Indonesia and its Threats to Democracy BT - Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPPS 2017). Atlantis Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icspp-17.2018.23>

- Inkubator (2019). *Exit Poll Pemilu 2019*. Retrieved from http://www.indikator.co.id/uploads/20190419215553_Exit_Poll_Pemilu_2019_Indikator.pdf
- Mejandrzyk, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2017). Political identities: The missing link in the study of populism. *Party Politics*, 23(4), 530–533. <https://doi.org/10.1177/1354068817741287>
- Mietzner, M. (2015). Reinventing Asian populism: Jokowi's rise, democracy, and political contestation in Indonesia. *Policy Studies*, 7(2), 74.
- Mudde, C. (2017). *Populism: A Very Short Introduction*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190234874.001.0001>
- Mubandji, B. (2019). *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Presidensial by Borkhanuddin Mubandji | Goodreads*. Intrans.
- Pain, B. (2018). *Edi Hadiz: Kuasa Oligarki Dilanggengkan lewat Populisme Islam | Balairungpress*. Retrieved from [http://www.balairungpress.com/2018/08/19211/The Economist \(2018\). Democracy Index 2018: Me too? Retrieved from https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy2018](http://www.balairungpress.com/2018/08/19211/The Economist (2018). Democracy Index 2018: Me too? Retrieved from https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy2018)
- Orhanan, N. (2013). The Populist Phenomenon. *Raisons Politiques*, 51(3), 137–154. <https://doi.org/10.3917/rai.051.0137>

BIODATA EDITOR DAN PENULIS

cotop beragam seperti hubungan internasional, administrasi publik, *new public management*, *urban development*, *religious studies*, *creative industries* dan *cultural studies*. Menjadi *Associate Editor* di jurnal internasional bernama *The International Journal of the Humanities* yang berpusat di Champaign, Illinois, Amerika Serikat.

Gunawandi, adalah Doktor bidang Ekonomi dengan peminatan *tools public management* dan pembangunan yang lahir pada tahun 1963. Saat ini merupakan Wakil Rektor I Bidang Akademik di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta. Rekam jejak dan keterlibatan dalam kajian pembangunan dimulai sejak bergabung sebagai konsultan untuk Bank Dunia maupun Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Perhatian dan minatnya pada kajian ekonomi pembangunan membahaskan banyak artikel terbitan jurnal ilmiah berindeks di peringkat internasional.

Raffi Panenang Inawan merupakan peneliti di Populi Center, mempunyai pendidikan strata 1 di bidang ilmu pemerintahan, Departemen Ilmu Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, sedangkan pendidikan strata 2 di bidang Ilmu Politik di Department of Government, Uppsala University. Memiliki minat kajian pada isu-isu modal sosial, partai politik dan demokrasi. Penulis dapat dihubungi melalui email di rainwa@gmail.com

Jeffri Adriansyah merupakan peneliti di Populi Center, mempunyai pendidikan strata 1 di bidang ilmu administrasi negara, Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada. Saat ini sedang menempuh studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia. Memiliki minat kajian pada bidang politik, perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Penulis dapat dihubungi melalui email di jefadriansyah@gmail.com

Dr. Endi Haryono adalah dosen pada International Relations Study Program, President University. Menyelesaikan S1 pada Jurusan HI UGM (1991), kemudian bekerja sebagai wartawan & editor pada Harian Bernas (1991-1996). Ketika mahasiswa bekerja paruh waktu sebagai Instruktur Bahasa Indonesia untuk *expatriate* dan penerjemah buku. Sebagai dosen, ia pernah mengajar (penuh & tamu), pada beberapa universitas yakni UPN Yogyakarta, UMY Yogyakarta, Program Pasca Sarjana UGM, dan School of International Studies (SofS), College of Law Government and International Studies (COLGIS), University Utara Malaysia. Beberapa bukunya telah diterbitkan, termasuk karya terjemahan, antara lain: *Kematian Sosialisme* (1992), *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia* (1995), *Blueprint Jepang Baru* (1995), *Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan* (1997), *Politik Muslim* (1998), *Hantu Digoel* (2001), *Menulis Skripsi: Panduan Untuk Mahasiswa Hubungan Internasional* (co-editor Saptopo Ikodot, 2005), dan *Dilema Mahathir: Kebijakan Ekonomi Politik Malaysia dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Asia* (2010). Email: endi@president.ac.id

Abdullah Sumrahadi kelahiran tahun 1977, adalah Doktor Sosiologi dalam bidang Seni dan Kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada. Memiliki minat dan latar belakang studi yang

Gunawan Hartono merupakan peneliti di Populi Center, menempuh pendidikan strata 1 di bidang Ilmu Sosiologi, Departemen Sosiologi, Universitas Gadjah Mada. Berpengalaman dalam penguatan masyarakat sipil di Yogyakarta dan memiliki minat kajian sosiologi politik. Penulis dapat dihubungi melalui email di gebanda@gmail.com

Marwanto lahir dan menetap di Kulonprogo, DIY. Alumni Fisip UNS Solo dan Pascasarjana Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta. Sebagai penyelenggara pemilu, ia mengawali karirnya dari bawah: Pantarlib dan anggota KPPS pada Pemilu 1999, anggota PPK pada Pemilu 2004 dan Pilkada 2006, kemudian dua periode menjabat komisioner KPU Kabupaten Kulonprogo (2008-2013, 2013-2018). Kini, selain aktif di Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) DIY, juga merintis Studi Literasi Demokrasi dan Budaya (StLi_Daya). Buku yang pernah ditulis diantaranya *Demokrasi Kerumahan: Bunga Rampai tentang Pemilu, Demokrasi dan Budaya Politik* (Interlude, 2018) dan *BYAR: Membaca Tanda Menujif Budaya* (Interlude, 2019). Korespondensi melalui surel: marbhyar@yahoo.com atau inbox di akun FB: *Marwanto (Marwan bin Mah Syamri)*.

Satrio Arismunandar adalah penulis buku, blogger, praktisi media, dan mantan dosen Ilmu Komunikasi di President University. Pernah menjadi wartawan Harian Kompas (1988-1995) dan Trans TV (2002-2012). Pendidikan formalnya adalah lulusan S1 Elektro FT UI (1989), S2 Pengkajian Kerahanan Nasional UI (2000), S2 Manajemen Bisnis di Asian Institute of Management (AIM) Filipina (2009), dan S3 Ilmu Filsafat FIB UI (2014). E-mail: sawitriarismunandar@gmail.com. Mobile/WA: 081286299061.

Abubakar Fhy Hara dosen senior di Departemen Hubungan Internasional Universitas Jember. Meraih gelar doktor di Australia National University di tahun 2000.

Muhammad Syafi Anwar adalah seorang sejarawan dan jurnalis Indonesia. Dia adalah seorang peneliti senior di Ash Center for Governance dan Inovasi Demokrasi serta direktur eksekutif dari International Center for Islam and Pluralism (ICIP). Berperan penting dalam pendirian Asosiasi Intelektual Muslim Indonesia, yang berpartisipasi dalam pertemuan tahun 1990 dengan B. J. Habibie yang mengarah pada pendirian organisasi.

Muhammad Raudy Gathmyr

Raudy Gathmyr lulus program S-1 Ilmu Komunikasi Massa dari FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2000 dan Master Ilmu Hubungan Internasional dengan kelulusan *Diploma dan Kajian Strategi dan Keamanan* pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional UI 2004. Pernah menjadi jurnalis televisi swasta nasional di Jakarta untuk desk *International Politics* pada 2000-2003 dengan posisi terakhir sebagai *Executive News Producer* dan pada saat yang sama menjadi dosen tetap di berbagai kampus di Jakarta. Setelah mengalami karir singkat di dunia jurnalistik, sejak tahun 2005 sampai saat ini Raudy berkarir secara penuh sebagai dosen media dan komunikasi. Pada tahun 2015-2018 mendapat beasiswa PhD in Journalism dari Pemerintah Australia di Griffith University, Gold Coast Campus, Queensland, Australia. Raudy adalah anggota aktif organisasi keilmuan media dan komunikasi internasional, IAMCR (International Association for Media and Communication Research) divisi *Japan and Media*, *International Communication & Political Communication*. Aktif menjadi pemakalah di berbagai forum konferensi internasional di Rusia, Bulgaria, Malaysia, Thailand,